



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan YME atas segala petunjuk dan bimbinganNya sehingga tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, Laporan Kinerja Instansi (LKj) ini disusun dimaksudkan sebagai bahan informasi dan evaluasi serta tanggung jawab pelaksanaan kinerja untuk Tahun 2023.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan, dan semoga Laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kabupaten Tanah Laut di masa - masa mendatang..... Aamiin.

Pelaihari, 2 Januari 2024

**Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut**



Ir. SAHRUDIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19661210 199403 1 007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja satu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indicator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indicator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis tahun 2018 – 2023.

Indikator yang digunakan adalah indicator kinerja utama sasaran yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap masyarakat yang terdampak bencana yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang dimaksud. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut.

Dalam pencapaian target kinerja BPBD Kab. Tanah Laut harus memberikan layanan secara prima. Adapun beberapa kegiatan yang mendorong keberhasilan pencapaian target kinerja tersebut, sebagai berikut :

- Pelaksanaan kebijakan Instruksi Bupati Tanah Laut No. 6 Tahun 2023 Tentang Distribusi Air Bersih Untuk Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Yang Mengalami Krisis Air Bersih. Selama pelaksanaannya tidak kurang dari 2 juta liter air yang didistribusikan.
- Penanganan pada 288 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan luas lahan yang terbakar kurang lebih 602,92 Ha.
- Pemberian bantuan logistik bagi masyarakat yang terkena bencana.

Demikian dengan disusunnya LAPKIN ini dapat memberikan informasi dan manfaat serta evaluasi dalam pengambilan keputusan guna lebih mendorong peningkatan kinerja maupun kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Tanah Laut di masa yang akan datang.

Pelaihari, Januari 2024

Kepala Pelaksana

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tanah Laut**



Ir. SAHRUDIN
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19661210 199403 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum	2
D. Cascading Kinerja.....	3
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
F. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	6
G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran.....	7
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya	

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	12
B. Strategi dan Arah Kebijakan	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi.....	22
1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan	22
2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis	29
3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Penunjang	32
B. Akuntabilitas Keuangan.....	43
1. Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2023.....	43
2. Anggaran dan Realisasimenurut Sasaran dan Program	44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Strategi Peningkatan Kinerja	49

LAMPIRAN

IKU

Pernyataan hasil Reviu

Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Cascading/Pohon Kinerja

Capaian per triwulan (1-4)

Monev Renstra

Matrik Keselarasan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Pergolongan / Pendidikan Tahun 2023	7
Tabel 1.2	Matrik Tindak Lanjut Evaluasi Sakip 2023	9
Tabel 2.1.	Tujuan dan Sasaran Strategis.....	14
Tabel 2.2.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	17
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja 2023	19
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
Tabel 3.1.	Tingkat Risiko Di Kabupaten Tanah Laut	23
Tabel 3.2.	Realisasi IRB 2023	23
Tabel 3.3.	Perbandingan Realisasi IRB pertahun	24
Tabel 3.4.	Perbandingan Realisasi IRB 2023 dengan PD Lain.....	24
Tabel 3.5.	Tabel Target dan Capaian IKM BPBD Kab. Tanah Laut	29
Tabel 3.6.	Tabel Capaian IKM BPBD Kab. Tanah Laut dengan PD Lain.....	30
Tabel 3.7.	Realisasi Keuangan Sasaran Strategis	30
Tabel 3.8.	Realisasi Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi	32
Tabel 3.9.	Perbandingan Realisasi Dengan Tahun Sebelumnya	33
Tabel 3.10.	Realisasi IKU	36
Tabel 3.11.	Perbandingan Realisasi IKU Dengan Tahun Sebelumnya	38
Tabel 3.12	Realisasi Belanja Pegawai 2023	44
Tabel 3.13.	Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2023	44
Tabel 3.14	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46
Tabel 3.15.	Realisasi Menurut Program/Kegiatan/Subkegiatan	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Cascading BPBD Kab. Tanah Laut	3
Gambar 1.2. SOTK BPBD Kab. Tanah Laut	4
Gambar 1.3. SDM BPBD Kab. Tanah Laut	8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Atas dasar tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Laporan Kinerja (LKj) secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja (LKj) disusun sebagai media pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut tahun 2023 adalah sebagai berikut berikut ini:

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut tahun 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2023.
2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Inspektorat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut tahun 2023 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

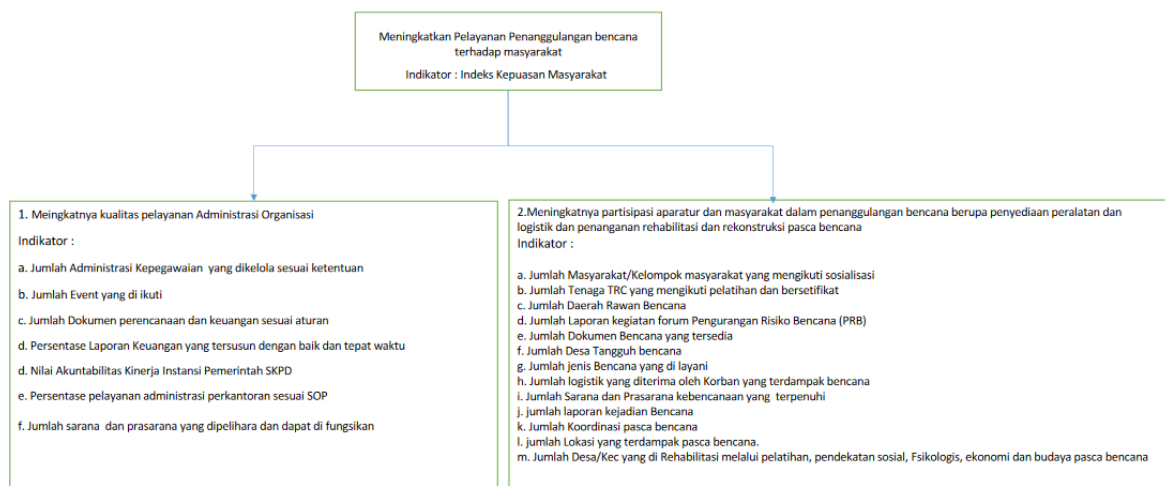
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

D. Cascading Kinerja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut adalah salah satu Unit Kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang mengampu sasaran strategis daerah. Adapun cascading kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

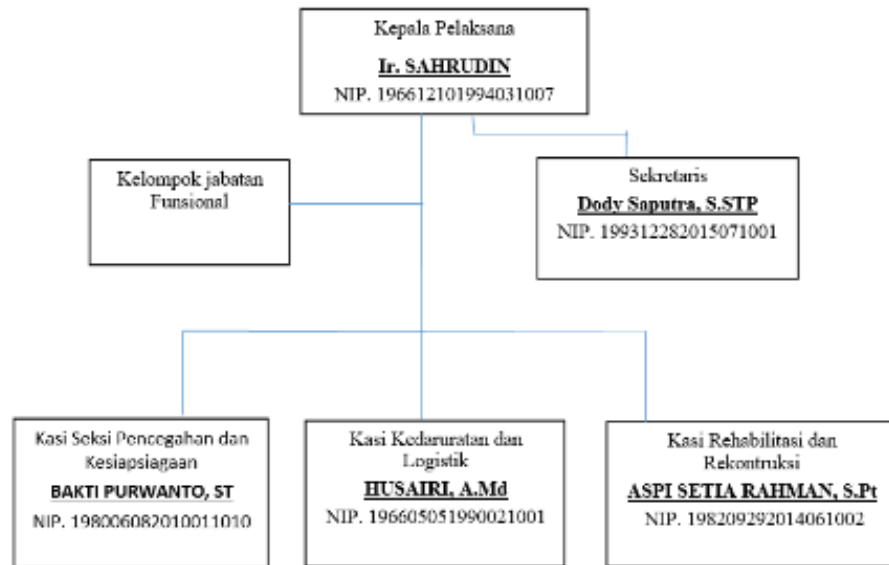
Gambar 1.1. Cascading BPBD Kab. Tanah Laut



E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan bagian dari SKPD di Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas peraturan daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 1.2. SOTK BPBD Kab. Tanah Laut



BPBD Kabupaten Tanah Laut merupakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana BPBD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi BPBD terdiri dari Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris Badan, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kasi Kedaruratan dan Logistik, Kasi rehabilitasi dan Rekonstruksi. Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing masing jabatan tersebut adalah :

1. Kepala Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan seluruh pelaksanaan kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup urusan dan wewenangnya;
 - b. merumuskan kebijakan teknis dan operasional di bidang penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan kemitraan dalam peningkatan penanganan penanggulangan bencana;
 - e. membina, mengawasi dan mengendalikan program penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan prundang-undangan;

- f. membuat laporan kinerja bidang penanggulangan bencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya kepada Bupati; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. Perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan;
 - c. Penyelenggaraan urusan umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. Penyelenggaraan urusan kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. Penyelenggaraan pusat data dan informasi kebencanaan;
 - g. Pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana;
 - h. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Sekretariat.
3. Seksi Mitigasi Bencana dalam menjalankan tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan pencegahan dan mitigasi bencana mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
 - c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
 - d. Pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
 - e. Penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
 - f. Pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
 - g. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan resiko bencana; dan
 - h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Mitigasi Bencana.
4. Seksi Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan kedaruratan dan operasional

penanggulangan bencana. Seksi kedaruratan bencana dan Opsional Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Opsional Penanggulangan Bencana;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan opsional penanggulangan bencana;
 - c. Penyelenggaraan kedaruratan dan opsional penanggulangan bencana;
 - d. Pengkoordinasian opsional penanggulangan bencana;
 - e. Penyelenggaraan analisis dan pengkoordinasian pemantauan status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
 - f. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana;
 - g. Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat; dan
 - h. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian sistem komunikasi kebencanaan; dan
 - i. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Seksi Kedaruratan dan Opsional Penanggulangan Bencana.
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan rehabilitasi. Rehabilitasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja rehabilitasi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis rehabilitasi;
 - c. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi rehabilitasi;
 - d. Penyelenggaraan dan pengkoordinasian perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
 - e. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja rehabilitasi

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis didasarkan pada analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta dengan memperhatikan kekuatan

dan kelemahan pada BPBD Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan Indeks risiko bencana (IRB) di Kabupaten Tanah Laut
2. Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat yang terdampak bencana;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memanfaatkan perkembangan teknologi;
4. Upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan bekerjasama dengan instansi lain baik vertikal maupun horizontal;
6. Pembangunan pusat data dan informasi bencana melalui pemanfaatan teknologi;
7. Penyediaan dana rencana kontigensi dengan dukungan kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

G. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana dan Anggaran

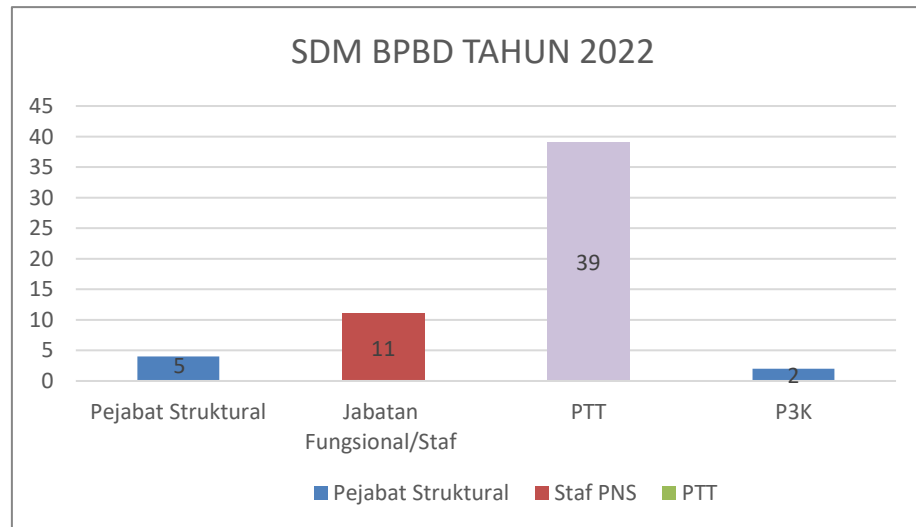
Jumlah ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut terhitung pada bulan Desember 2023 adalah sebanyak 19 (sembilan belas) orang dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Pergolongan / Pendidikan Tahun 2023

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
1	8	8	-	2	19	-	6	2	-	11	-	-	19

jumlah kebutuhan pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan peta jabata adalah sebanyak 56 (lima puluh enam) pegawai sehingga diperlukan tenaga non ASN untuk membantu pelaksanaan tugas agar BPBD dapat memberikan pelayanan secara prima dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dan disepakati dengan pimpinan.

Gambar 1.3. SDM BPBD Kab. Tanah Laut



Berdasarkan pada table diatas terlihat bahwa terdapat 17 (tujuh belas) pegawai negeri sipil ditambah dengan 2 orang P3K dan 37 (tiga puluh Tujuh) tenaga PTT dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan sebutan Tenaga Administrasi 6 (enam) orang, Rescuer 25 (Dua puluh lima) orang dan Pusdalops PB 3 (tiga) orang yang ditempatkan di dikantor induk BPBD dan 3 (tiga) orang di Kecamatan Kintap.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, BPBD Kab. Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana sebanyak 480 unit peralatan dan 1 unit hedung kantor. Peralatan khusus penanganan dan penanggulangan bencana terdapat sebanyak 204 unit peralatan termasuk kendaraan bermotor. Dari 204 peralatan penanggulangan bencana terdapat 174 unit peralatan yang masih bisa digunakan dan terdapat 20 unit peralatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga didukung oleh anggaran yang cukup memadai yaitu sebesar Rp. 5.091.724.452 yang terbagi dalam 2 (dua) Program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan.

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2022 ada beberapa rekomendasi oleh APIP terkait pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut yang tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022. Adapun tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh APIP dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 1.2
Matrik Tindak Lanjut Evaluasi Sakip 2023

No.	Komponen Kinerja	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Perencanaan Kinerja	Terhadap dokumen perencanaan agar diselaraskan baik indikator kinerja maupun target kinerja yang telah ditetapkan (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan (penyelarasan indikator) dari renstra, renja,dan perjanjian kinerja	3 Dokumen (Renstra, Renja, PK)	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Seluruh Kepala Seksi	telah dilaksanakan
		Target kinerja yang telah ditetapkan agar realistis dan dapat dicapai (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan (penyelarasan indikator dan target) dari renstra, renja,dan perjanjian kinerja	3 Dokumen (Renstra, Renja, PK)	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Seluruh Kepala Seksi	telah dilaksanakan
		Terhadap dokumen perencanaan kinerja agar terus dilakukan perbaikan/ penyempurnaan (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dokumen perencanaan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku	3 Dokumen (Renstra, Renja, PK)	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris, Seluruh Kepala Seksi	telah dilaksanakan
		Terhadap dokumen perencanaan agar dilakukan reviu secara berkala dengan membuat laporan hasil reviu sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan reviu terhadap dokumen kinerja 1 (satu) tahun dalam sekali	1 Dokumen reviu laporan kinerja.	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan
2	Pengukuran Kinerja	Agar dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja dan dilakukan secara berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala – kendala dalam pencapaian target kinerja dan dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja (Rekomendasi tahun 2023)	telah dibangun sistem pengumpulan lengkap data capaian kinerja untuk memonitoring data capaian secara berkala	1 Dokuemen SK Penetapan/proposal inovasi Sistem tempeleng tapaija	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan
		Perlunya pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati (Rekomendasi tahun 2023)					tidak dilaksanakan
		Hasil monitoring pencapaian kinerja yang dilakukan secara berkala agar dijadikan dasar untuk perbaikan kinerja (Rekomendasi tahun 2023)	telah dibangun sistem pengumpulan lengkap data capaian kinerja untuk memonitoring data capaian secara berkala	1 Dokuemen SK Penetapan/proposal inovasi Sistem tempeleng tapaija	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan

No.	Komponen Kinerja	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
3	Pelaporan Kinerja	Laporan kinerja agar menyajikan analisis pada setiap pencapaian target kinerja dan menyajikan perbandingan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan
		Laporan kinerja agar menginformasikan pencapaian target kinerja dan menyajikan target jangka menengah (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan
		Agar dalam Laporan Kinerja menyajikan pencapaian target kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja) (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan
		Laporan kinerja agar menyajikan kualitas atas keberhasilan/ kegagalan/ hambatannya dalam mencapai target kinerja beserta upaya nyata/ rencana aksi (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023 sesuai dengan permenpan 54 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Hasil asistensi Kemenpan.	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan
		Laporan kinerja agar menyajikan efisiensi atas penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan
		Laporan kinerja agar menyajikan perbaikan dan penyempurnaan kinerjanya	Telah dilakukan perbaikan dalam penyusunan Laporan kinerja 2023	1 Dokumen Laporan Kinerja	Triwulan IV Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan
		Agar Dilakukan reviu secara berjenjang atas laporan kinerja yang disusun sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai	Kesepakatan terhadap penyusunan Laporan Kinerja	1 dokumen Berita Acara	Triwulan I Tahun 2024	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan

No.	Komponen Kinerja	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progres Penyelesaian
		Penunjukan petugas yang menangani pengumpulan data kinerja	telah dibangun sistem pengumpulan lengkap data capaian kinerja untuk memonitoring data capaian secara berkala	1 Dokuemen SK Penetapan/proposal inovasi Sistem tempeleng tapaija	Triwulan III Tahun 2023	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti (Rekomendasi tahun 2023)	Telah dilakukan tindak lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022	1 dokumen matrik tindak lanjut	Triwulan I Tahun 2024	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan
		Agar monitoring, evaluasi dan pemantauan terhadap rencana aksi pencapaian kinerja ditindak lanjuti untuk perbaikan kinerja (Rekomendasi tahun 2023)	dilakuakn monev terkait pemenuhan tindak lanjut	1 Dokumen reviu laporan kinerja.	Triwulan I Tahun 2024	Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris	telah dilaksanakan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi BPBD dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Tanah Laut 2018 - 2023 selaras dengan misi ke-2, Ke 3 dan Ke 5 Yaitu :

- Misi 2. “Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif “ dengan Penjabaran bahwa Menciptakan inovasi dalam pelayanan Kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang berstandar untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kebencanaan.
- Misi 3 “Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)” dengan Penjabaran Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan Kebencanaan di Kabupaten Tanah laut
- Misi 5 “ *Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat*” dengan Penjabaran Misi bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana bahwa penanganan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, sehingga BPBD Kabupaten Tanah Laut harus Membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Selatan.

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut 2018-2023 adalah :

- a. Tercapainya kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang terdampak bencana.
- b. Tercapainya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana.
- c. Tercapainya kualitas pemenuhan dukungan operasional organisasi

Untuk mencapai tujuan tersebut dan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, maka ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang harus dilaksanakan. Dalam melaksanakan sasaran strategis tersebut harus didukung formalisasi kebijakan yang

membuat masyarakat tangguh dan mampu menghadapi bencana. Sasaran strategis tersebut antaralain :

1. Meningkatkan pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat
2. Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2		3	4	5	6	7	8
	Misi ke 5 yaitu: Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat							
		Tercapainya kepedulian dan koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana	Persentase Penanggulangan bencana	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	82,15 (BAIK)	85,25 (BAIK)	86,50 (BAIK)	87,55 (BAIK)	87,75 (BAIK)
		Tercapainya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa Penyediaan peralatan logistik dan penanganan Rehabilitasi Rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Dokumen Penanggulangan Bencana	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
		Meningkatnya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan dan logistik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Jumlah Masyarakat/Kelompok masyarakat yang mengikuti sosialisasi	275 orang	120 orang	150 orang	150 orang	160 orang
			Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang
			Jumlah Daerah Rawan Bencana	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec	11 Kec
			Jumlah Laporan kegiatan forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
			Jumlah Dokumen Bencana yang tersedia	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok
			Jumlah Desa Tangguh bencana	3 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa	2 Desa
			Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis
			Jumlah logistik yang diterima oleh Korban yang terdampak bencana	250 Paket	300 Paket	300 Paket	350 Paket	350 Paket
			Jumlah Sarana dan Prasarana kebencanaan yang terpenuhi	27 Buah	19 buah	25 Buah	30 Buah	35 buah
			jumlah laporan kejadian Bencana	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
			Jumlah Koordinasi pasca bencana	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali

				jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana.	11 Kec	11 Kec	11 kec	11 kec	11 kec
				Jumlah Desa/Kec yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana	4 Desa/ Kec	4 Desa/ Kec	4 Desa/ Kec	4 Desa/ Kec	4 Desa/ Kec
	Misi ke 3 yaitu: Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			Tercapainya kualitas pemenuhan dukungan operasional organisasi					
		Tercapainya kualitas pemenuhan dukungan operasional organisasi							
			Meingkatkan kualitas pelayanan Administrasi Organisasi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	19 Buah	20 Buah	22 Buah	23 Buah	25 Buah
				Jumlah Administrasi Kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen
				Jumlah Event yang di ikuti	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran	2 Pameran
				Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
				Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
				Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut dalam melindungi masyarakat dari acaman bencana dan penanggulangan bencana memerlukan strategi dan arah kebijakan tertentu. Adapun strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut dalam menanggulangi bencana adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan upaya penerapan inovasi dalam pelayanan kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan.
- b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan Kebencanaan.
- c. Melindungi masyarakat terdampak bencana melalui mitigasi bencana, penguatan kelembagaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui penyelenggarakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan berbagai pihak yang berkepentingan didalamnya diharapkan dapat memperbaiki, mengurangi kerusakan dan mengembalikan kondisi seperti semula sebelum terjadi bencana sehingga sasaran untuk meningkatkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat terwujud.
- d. Kebijakan BPBD Kabupaten Tanah Laut Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan bersama untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Selain dari strategi, diperlukan juga arah kebijakan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan dari organisasi, adapun arah kebijakan yang akan diambil oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut dalam mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan inovasi dan kreatifitas stockholder terkait, masyarakat dan dunia usaha untuk 16ersama sama dalam menanggulangi bencana.
2. Mewujudkan kesiapsiagaan petugas TRC, Pusdalops PB dan Peralatan BPBD dan merespon Penanggulangan bencana.
3. Mewujudkan kesiapsiagaan seluruh stackholder terkait, masyarakat dan dunia usaha secara terencana dan terpadu.
4. Mewujudkan ketangguhan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.

5. Melaksanakan pemulihan bencana melalui rehabilitasi dan rekontruksi yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha bersama-sama dengan instansi pemerintah, akademisi, TNI/polri maupun nasional maupun International.

Tabel 2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

<p style="text-align: center;">VISI</p> <p>Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi, Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi</p>			
<p style="text-align: center;">MISI I</p> <p>Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya</p>			
<p style="text-align: center;">MISI II</p> <p>Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Inovasi dalam pelayanan kebencanaan	Meningkatnya Inovasi Pelayanan Kebencanaan	Peningkatan upaya penerapan inovasi dalam pelayanan kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan.	Mewujudkan inovasi dan kreatifitas stockholder terkait, masyarakat dan dunia usaha untuk 17ersama sama dalam menanggulangi bencana.
<p style="text-align: center;">MISI III</p> <p>Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan Kebencanaan	Mewujudkan kesiapsiagaan petugas TRC, Pusdalops PB dan Peralatan BPBD dan merespon Penanggulangan bencana.
<p style="text-align: center;">MISI IV</p> <p>Meningkatkan kualitas dan kuantitas religiusitas dalam penyelenggaraan</p>			
<p style="text-align: center;">MISI V</p> <p>Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat</p>			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tercapainya kepedulian dan koordinasi antara Pemerintah daerah, Masyarakat dan dunia Usaha dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan Pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat.	Melindungi masyarakat terdampak bencana melalui mitigasi bencana, penguatan kelembagaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu dan penanganan rehabilitasi Rekonstruksi	1. Mewujudkan kesiapsiagaan seluruh stackholder terkait, masyarakat dan dunia usaha secara terencana dan terpadu.
			2. Mewujudkan ketangguhan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
			3. Melaksanakan pemulihan bencana melalui rehabilitasi dan rekontruksi yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha bersama-sama dengan instansi pemerintah, akademisi, TNI/polri maupun nasional maupun International.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2023 telah disepakati bersama dan ditetapkan Perjanjian Kinerja Lingkup BPBD Kab. Tanah Laut sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	87,75 (BAIK)	Kepala Pelaksana BPBD
2.	Meningkatkannya partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	- Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	150 orang	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		- Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 Orang	
		- Jumlah Daerah Rawan Bencana	11 Kecamatan	
		- Jumlah Laporan kegiatan Forum PRB	1 Laporan	
		- Jumlah Dokumen bencana yang tersedia	1 Dokumen	
		- Jumlah Desa Tangguh Bencana	2 Desa	
		- Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	Kasi Kedaruratan dan Logistik
		- Jumlah Logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana.	350 Paket	
		- Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	35 Buah	
		- Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan	
		- Jumlah Koordinasi pasca bencana	3 Kali	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
		- Jumlah Lokasi yang terkena dampak pasca bencana	11 Kec	
		- Jumlah Desa/Kec yang di Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa/Kec	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi organisasi	- Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	Sekretariat
		- Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	25 Buah	
		- Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	
		- Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran	
		- Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	
		- Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	
		- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	

Adapun perjanjian kinerja BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Kepala Pelaksana BPBD		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Penanggulangan Bencana Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,58
Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPBD	80,01
Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana	Persentase Peningkatan Jumlah Desa Tangguh Bencana	50%
	Persentase SDM TRC BPBD yang tersertifikasi keahlian kebencanaan (dari lembaga profesi yang BNPB)	25%
Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas sistem kedaruratan bencana dan logistik	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan keaduratan (pencarian, pertolongan, dan evakuasi) dan bantuan logistik.	80%
Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya pemulihan bencana	Persentase Sektor Kebutuhan Bencana yang Dipulihkan	100%
Sekretaris		
Sasaran	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja (SAKIP BPBD)	24
Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja (SAKIP BPBD)	10
Meningkatnya Layanan Administrasi perkantoran	Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian	100%
	Persentase Barang yang dapat digunakan (dalam kondisi baik)	80%

D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati maka dibangun suatu sistem pengumpulan data capaian kinerja yang diberi naman Sistem Pengumpulan Lengkap Data Capaian Kinerja (Tempeleng Tapaija). Tempeleng Tapaija akan memudahkan para ASN BPBD Kab. Tanah Laut dalam mengumpulkan data realisasi kegiatan, data capaian kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa harus hadir di kantor dikarenakan kesibukan para

ASN BPBD Kab. Tanah Laut dalam penanggulangan bencana di lapangan.dengan menggunakan Tempeleng Tapaija maka pimpinan dapat memonitoring data capaian kinerja dan dapat memberikan instruksi langsung sesuai dengan arah kebijakan yang akan diambil agar dapat mempercepat pencapaian kinerja.

Selain Sistem Pengumpulan Lengkap Data Capaian Kinerja (Tempeleng Tapaija) Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menggunakan aplikasi buatan pemerintah pusat untuk menunjang capaian kinerja seperti Inarisk dari BNPB, e-Kinerja dari BKN, Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri dan lain-lain.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan laporan tahun ke lima atau tahun terakhir Renstra BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2018- 2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja tujuan, indikator kinerja sasaran, dan indikator kinerja seluruh pejabat struktural yang ada di BPBD Kab. Tanah Laut sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perbandingan juga dilakukan dengan kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya serta dengan kinerja yang dicapai oleh daerah lain apabila memungkinkan. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan- tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu SKPD yang pengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten. Adapun IKU Kabupaten yang diampu oleh BPBD Kab. Tanah Laut adalah Indeks Resiko Bencana. Pengkajian indeks risiko bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu wilayah (komunitas, daerah) dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan kapasitas. Secara konseptual, pengkajian risiko bencana dilaksanakan dengan pendekatan hubungan antara risiko bencana, bahaya, kapasitas dan kerentanan. Risiko bencana berhubungan positif/selaras dengan kehadiran bahaya dan kerentanan, serta berhubungan terbalik dengan kehadiran kapasitas.

Tingkat risiko bencana merupakan gabungan dari tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas yang telah dihasilkan sebelumnya. Hasil rangkuman dalam menghasilkan tingkat risiko untuk potensi bencana di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.1 Tingkat Risiko Di Kabupaten Tanah Laut

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT BAHAYA	TINGKAT KERENTANAN	TINGKAT KAPASITAS	TINGKAT RISIKO
1	Banjir	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
2	Banjir Bandang	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
3	Cuaca Ekstrims	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
4	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6	Kekeringan	Sedang	Rendah	Rendah	Sedang
7	Tanah Longsor	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Kajian Risiko Bencana 2018-2023

Dari hasil penggabungan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas dapat ditentukan tingkat risiko bencana Kabupaten Tanah Laut. Tingkat risiko untuk 7 jenis bencana di Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi dengan tingkat risiko tinggi. Hal ini gambaran bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan pihak terkait untuk menyusun upaya-upaya untuk pengurangan risiko bencana guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Tanah Laut.

Nilai Indek Risiko Bencana (IRB) Kab. Tanah Laut Tahun 2023 berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui <https://inarisk.bnpb.go.id/irbi> adalah sebesar 143,43 atau dalam klasifikasi sedang. Adapun perbandingan antara target dan realisasi IRB kab. Tanah Laut Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2. Realisasi IRB 2023

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks Risiko Bencana	125 (Sedang)	169,22 (tinggi)	

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah

ditetapkan sasaran beserta indikator sasaran sesuai tabel sebagaimana di atas, maka dalam rangka membandingkan capaian sasaran antara tahun 2022 dengan 2023, sebagai berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi IRB pertahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Indeks Resiko bencana	Nilai	172,71 (Tinggi)	156,86 (Tinggi)	169,22 (Tinggi)

Sumber : <http://admin.inarisk.bnpb.go.id/login>

sedangkan untuk perbandingan capaian IRB Kabupaten Tanah Laut dengan capaian IRB Nasional, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota sekitar Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi IRB 2023 dengan PD Lain

No	Indikator	Perbandingan					
		Kab.Tanah Laut	Kab. Banjar	Kab. Tanah Bumbu	Kota Banjarmasin	Prov. Kalimantan Selatan	IRB Nasional
1	Indeks Resiko bencana	169,22 (Tinggi)	133,44 (Sedang)	137,92 (Sedang)	92,44 (rendah)	129,44 (Rendah)	

Nilai IRB Kab. Tanah Laut di dapat berdasarkan pembobotan antara bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Tingkat bahaya dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi, dan kekuatan dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan ancaman lainnya, komponen bahaya mengacu pada baseline IRBI 2013 yang diolah dari KRB skala provinsi tahun 2011. Komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk bisa diturunkan. Hal ini karena tren dari dampak bahaya yang cenderung meningkat tiap tahunnya.

Komponen kerentanan adalah komponen yang dihitung berdasarkan parameter kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Komponen kerentanan juga cenderung mengalami peningkatan dengan adanya penambahan penduduk, migrasi ke kawasan urban, peningkatan pembangunan,

degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Fenomena tersebut menyebabkan sulitnya menurunkan indeks risiko bencana.

Oleh karena itu, penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan komponen kapasitas (*coping capacity*) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kabupaten/kota. Komponen kapasitas dihitung berdasarkan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan perangkat Penilaian Indeks Ketahanan Daerah yang terdiri dari 7 prioritas dan 71 Indikator.

BPBD Kab. Tanah Laut pada tahun 2023 melaksanakan program/kegiatan dalam rangka menurunkan Indeks Risiko Bencana melalui pemenuhan 71 indikator IKD dengan melakukan beberapa langkah antarlain :

- a) Pelaksanaan review Rencana Kontijensi Banjir
- b) Penyusunan Laporan Kajian Kebutuhan Pasca Bencana
- c) Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan. Kekeringan, dan Penurunan Hasil Produksi Pangan.
- d) Aktivasi Pos Komando dan Pos Lapangan Penanganan Karhutla
- e) Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi mitigasi bencana di daerah rawan bencana.
- f) Pengembangan dan pembinaan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Destana)
- g) Pemberian bantuan logistik pada korban bencana
- h) Pendataan dan indentifikasi terhadap korban bencana.
- i) Melakukan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.

Adapun beberapa kegiatan yang telah dilakukan sejak tahun tahun sebelumnya dan tetap dilanjutkan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Dukungan Pemasangan Peralatan Peringatan Dini
- b) Kajian Risiko Bencana
- c) Dukungan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
- d) Dukungan Penyusunan Rencana Kontingensi

- e) Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB)
- f) Pembinaan bagi relawan
- g) Penguatan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)
- h) Dukungan Dalam Penanganan Darurat Bencana

Pada tahun 2023 BNPB memberikan rekomendasi kebijakan yang harus diambil dalam rangka penurunan Indeks Risiko Bencana tahun berikutnya. Adapun rekomendasi tersebut dibagi sesuai prioritas IKD, antarlain :

- a. Prioritas Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan
 - Penguatan Aturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
 - Penerapan Aturan Teknis Pelaksanaan Fungsi BPBD
 - Penguatan Aturan dan Mekanisme Forum PRB
 - Optimalisasi Penerapan Aturan dan Mekanisme Penyebaran Informasi Kebencanaan
 - Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana
 - Penguatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Berbasis Kajian Risiko Bencana untuk Pengurangan Risiko Bencana
 - Penguatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Penguatan Forum PRB
 - Studi Banding Legislatif dan Eksekutif untuk Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana di Daerah
- b. Prioritas Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu
 - Penyusunan Peta Bahaya dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
 - Penyusunan Peta Kapasitas dan Pembaharuannya sesuai dengan aturan
 - Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah
- c. Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik
 - Penguatan Struktur dan Mekanisme Informasi Kebencanaan Daerah
 - Membangun Kemandirian Informasi Kecamatan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat

- Komunikasi bencana lintas lembaga
 - Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Pusdalops PB untuk Efektivitas Penanganan Darurat Bencana
 - Penguatan Sistem Pendataan Bencana Daerah
 - Sertifikasi Personil PB untuk Penggunaan Peralatan PB
 - Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan Daerah secara Bertahap, Berjenjang dan Berlanjut
 - Penyusunan Kajian Kebutuhan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
 - Penyediaan Gudang Logistik Kebencanaan Daerah
 - Meningkatkan Tata Kelola Pemeliharaan Peralatan serta Jaringan Penyediaan/Distribusi Logistik
 - Penyusunan Strategi dan Mekanisme Penyediaan Cadangan Listrik untuk Penanganan Darurat Bencana
 - Penguatan Strategi Pemenuhan Pangan Daerah untuk Kondisi Darurat Bencana
- d. Prioritas Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- Penerapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah untuk Pengurangan Risiko Bencana
 - Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Penataan Ruang Daerah untuk Pengurangan Risiko bencana
 - Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana
 - Peningkatan Kapasitas Dasar Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana
 - Pembangunan Desa Tangguh Bencana
- e. Prioritas Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana
- Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Penerapan Sumur Resapan dan Biopori
 - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Perlindungan Daerah Tangkapan Air
 - Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Banjir melalui Restorasi Sungai

- Pengurangan Frekuensi dan Dampak Bencana Tanah Longsor melalui Penguatan Lereng
 - Penguatan Aturan Daerah tentang Budidaya dan Konversi Lahan Gambut untuk Mengurangi Kemungkinan Kebakaran Hutan dan Lahan
 - Pembangunan/Revitalisasi tanggul, embung, waduk dan taman kota di daerah berisiko banjir
 - Restorasi lahan gambut di daerah berisiko Kebakaran Hutan dan Lahan
- f. Prioritas Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana
- Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Banjir melalui Perencanaan Kontijensi
 - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Banjir Daerah
 - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Tanah Longsor melalui Perencanaan Kontijensi
 - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor Daerah
 - Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui Perencanaan Kontijensi
 - Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah
 - Penguatan Mekanisme Penetapan Status Darurat Bencana
 - Penguatan Mekanisme Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana
 - Penguatan Kapasitas dan Mekanisme Operasi Tim Reaksi Cepat untuk Kaji Cepat Bencana
 - Pelaksanaan Penyelamatan dan Pertolongan Korban pada Masa Krisis
 - Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Perbaikan Darurat Bencana
 - Penguatan Kebijakan dan Mekanisme Pengerahan bantuan Kemanusiaan kepada Masyarakat Terdampak Bencana
 - Penguatan Mekanisme Penghentian Status Darurat Bencana
- g. Prioritas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
- Perencanaan Pemulihan Pelayanan Dasar Pemerintah Pasca Bencana
 - Perencanaan Pemulihan infrastruktur penting Pasca Bencana

- Perencanaan Perbaikan rumah penduduk Pasca Bencana
- Pemulihan Penghidupan Masyarakat Pasca Bencana dengan Berorientasi pada Pengurangan Risiko Bencana baru

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis sesuai dengan rencana strategis BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana, adapun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang terdampak bencana pada tahun 2023 sebesar 88,00.

Capaian indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 diperoleh melalui survey kepada penerima layanan yang dilaksanakan oleh BPBD Kab. Tanah Laut selama 4 triwulan, setiap triwulannya dilakukan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan oleh sekretariat BPBD Kab. Tanah Laut dengan mengedarkan 150 (seratus lima puluh) kuesioner kepada masyarakat yang terdampak bencana. Pada triwulan kesatu BPBD Kab. Tanah Laut memperoleh nilai 88,06, kemudian pada triwulan kedua memperoleh nilai 88,13, pada triwulan ketiga memperoleh nilai 87,56, dan pada triwulan keempat memperoleh nilai 88.

Adapun perbandingan indeks kepuasan masyarakat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Target dan Capaian IKM BPBD Kab. Tanah Laut

Indikator Kinerja	Target Kinerja					Capaian Kinerja			
	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,15 (Baik)	85,25 (Baik)	86,50 (Baik)	87,55 (Baik)	87,55 (Baik)	82,81 (Baik)	83,82 (Baik)	84,50 (Baik)	87,93 (Baik)

Dari table tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi peningkatan capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 3,43 atau sebesar 4,05 %. Persentasi capaian kinerja tahun 2023 (87,93) terhadap target kinerja pada tahun 2023 (87,75) adalah sebesar 100,41 %, sedangkan persentasi capaian kinerja tahun 2023 (87,93) terhadap target akhir restra (87,55) adalah sebesar 100,41 %.

Adapun capaian indeks kepuasan masyarakat BPBD Kab. Tanah Laut tahun 2023 jika dibandingkan dengan indeks kepuasan masyarakat BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan kabupaten lainnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.6 Capaian IKM BPBD Kab. Tanah Laut dengan PD Lain

No	Indikator	Perbandingan	
		Kab.Tanah Laut	Kab. Banjar
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	87,93	81,22

Dibandingkan dengan kabupaten/kota lain capaian IKM BPBD Kab. Tanah laut masih lebih tinggi dibandingkan dengan BPBD Kab. Banjar yang mana daerah tersebut adalah daerah perbatasan dari Kab. Tanah Laut.

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kepala Pelaksana BPBD Tahun 2023 di dukung melalui 2 (Dua) Program yang terdiri atas 10 (sepuluh) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan dengan realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Program Uraian	Anggaran Rp	Realisasi Rp	Capaian %
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.461.039.039	4.026.861.615	90,27%
		Program Penanggulangan bencana	630.685.413	500.388.000	79,34%
		J U M L A H	5.091.724.452	4.527.249.615	88,91%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada dalam mencapai target Indikator sasaran dengan hasil 100,41 % dan anggran yang terealisasi sebesar 88,91% sehingga terdapat efesiensi kinerja sebesar 11,5%, dimana angka tersebut diperoleh dari hasil pengurangan antara persentasi capaian kinerja dikurang persentasi realisasi keuangan. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penggunaan tegnologi dan informasi oleh BPBD Kab. Tanah Laut seperti penggunaan alat komunikasi radio yang memudahkan dalam penyampaian informasi dan penyusunan kaji cepat bencana, sehingga informasi yang di dapat tanpa harus melakukan observasi kelapangan dan jumlah sarana prasarana yang diturunkan ke lapangan sudah sesuai dengan kebutuhan.

Capaian IKM BPBD Kab. Tanah Laut tahun 2023 sesuai target yang telah ditetapkan tidak lepas dari usaha Aparatur yang ada di BPBD kab. Tanah Laut serta pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatan dengan baik. Adapun

program kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan IKM BPBD Kab. Tanah Laut tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- Pelaksanaan kebijakan Instruksi Bupati Tanah Laut No. 6 Tahun 2023 Tentang Distribusi Air Bersih Untuk Masyarakat Kabupaten Tanah Laut Yang Mengalami Krisis Air Bersih. Selama pelaksanaannya tidak kurang dari 2 juta liter air yang didistribusikan.
- Penanganan pada 288 kejadian kebakaran lahan dan hutan dengan luas lahan yang terbakar kurang lebih 602,92 Ha.
- Pemberian bantuan logistik bagi masyarakat yang terkena bencana.

Salah satu ruang lingkup pengukuran IKM BPBD Kab. Tanah Laut pada tahun 2023 yang perlu ditingkatkan dikarenakan selalu menjadi penilaian yang terendah adalah kesesuaian produk layanan. Kesesuaian Produk Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Walaupun selalu mendapatkan predikat baik akan tetapi pada saat dilakukan survey akan selalu menjadi peringkat terakhir dalam hasil penilaian.

Salah satu kendala dalam pencapaiannya adalah pada layanan pemberian logistik kepada korban bencana. Masyarakat masih merasa apa yang diberikan pemerintah daerah kepada korban bencana tidak sesuai dengan ekspektasi. Masyarakat mengharapkan bantuan yang diberikan sesuai dengan analisis dampak kerugian akibat bencana dan pemerintah tidak memiliki kemampuan keuangan dalam memulihkan seluruh dampak kerugian akibat bencana.

Pemerintah daerah telah membuat program dalam mitigasi bencana agar kerugian dampak bencana dapat diperkecil. Serta pemerintah melakukan pemulihan dampak bencana di bidang fasilitas umum terlebih dahulu. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kerugian dampak bencana antara lain adalah :

- Dengan menindaklanjuti laporan dari masyarakat terhadap bencana yang datang dan merespon kaji cepat yaitu waktu minimal untuk menanggulangi bencana (1 x 24) jam.
- Mendistribusikan secepat mungkin logistik kepada masyarakat yang terdampak bencana maksimal 1 hari setelah terjadi bencana.

- Melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait bencana di daerah rawan bencana.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal terkait bantuan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

3. Capaian Sasaran Strategis Penunjang

1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi

Sasaran strategis penunjang pertama meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi dengan 7 indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

Tabel 3.8. Realisasi Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Capaian	Persentase Capaian
1	Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi	1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	100%
		2	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	25 Buah	25 Buah	100%
		3	Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
		4	Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran	1 Pameran	50%
		5	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		6	Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	100%
		7	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	Baik	100%
Rata-Rata						92.85

Perbandingan Capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi pada tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja pada tahun 2022 dapat dilihat pada table sebagai berikut.

Tabel 3.9. Perbandingan Realisasi Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian		Peningkatan
	2022	2023	
Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%	100%	0%
Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	23 Buah	25 Buah	15%
Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen	5 Dokumen	0
Jumlah event yang di ikuti	1 Pameran	1 Pameran	0
Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen	3 Dokumen	0
Persentase Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	100%	100%	0
Nilai Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah SKPD	Baik	Baik	0

Seluruh capaian indikator kinerja Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi pada tahun 2023 telah memenuhi target yang telah ditetapkan, terkecuali satu indikator kinerja utama yang masih belum mencapai target yaitu jumlah even pameran pemerintah daerah. Sesuai target tahun 2023 jumlah even pameran pemerintah daerah yang diikuti adalah 2 pameran yaitu Pameran Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut dan Pameran Anggrek Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sedangkan pada tahun 2023 BPBD Kab. Tanah Laut hanya mengikuti 1 even pameran hari jadi Kabupaten Tanah Laut. Hal tersebut dikarenakan untuk pameran Anggrek Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tidak jadi dilaksanakan.

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi organisasi capaian sasaran ini telah dilaksanakan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 4.461.039.039 terealisasi sebesar Rp. 4.026.861.615 atau 90,27% dengan Kegiatan dan sub kegiatan:

- a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 4.550.003 terealisasi sebesar Rp. 4.465.270 atau 98,14% dengan Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 3.671.970 terealisasi sebesar Rp. 3.636.070 atau 99,02%
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 878.033 terealisasi sebesar Rp. 829.200 atau 94,44%
- b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 2.552.746.698 terealisasi sebesar Rp. 2.211.348.209 atau 86,63% dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 2.550.596.421 terealisasi sebesar Rp. 2.209.735.809 atau 86,64%
 - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 2.150.277 terealisasi sebesar Rp. 1.612.400 atau 74,99%
- c) Kegiatan Administrasi umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 260.889.121 terealisasi sebesar Rp. 246.228.726 atau 94,38% dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.956.153 terealisasi sebesar Rp. 1.538.220 atau 78,63%
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 61.412.761 terealisasi sebesar Rp. 53.493.840 atau 87,11%
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 2.136.255 terealisasi sebesar Rp. 1.581.306 atau 74,02%
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penganggotaan dengan anggaran sebesar Rp. 10.528.952 terealisasi sebesar Rp. 9.760.000 atau 92,70%
 - 5) Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000 terealisasi sebesar Rp. 10.000.000 atau 100%
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran sebesar Rp. 174.855.000 terealisasi sebesar Rp. 169.855.360 atau 97,14%

- d) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 99.490.810 terealisasi sebesar Rp. 87.155.000 atau 87,60%
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.101.547.407 terealisasi sebesar Rp. 1.037.152.453 atau 94,15% dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 73.105.539 terealisasi sebesar Rp. 42.707.342 atau 58,42%
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.028.441.868 terealisasi sebesar Rp. 994.445.111 atau 96,69%
- f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 441.815.000 terealisasi sebesar Rp. 440.511.957 atau 99,71% dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran sebesar Rp. 37.000.000 terealisasi sebesar Rp. 36.865.300 atau 99,64%
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan dengan anggaran sebesar Rp. 288.500.000 terealisasi sebesar Rp. 288.414.502 atau 99,97%
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 116.315.000 terealisasi sebesar Rp. 115.232.155 atau 99,07%

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung SDM yang berkualitas walaupun dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia namun dengan semangat dan kerja keras dari aparatur di lingkungan Sekretariat BPBD Kab. Tanah Laut dibantu staf PNS sebanyak 7 (tujuh) orang dan PTT sebanyak 2 (dua) orang yang siap membantu dan melayani tugas dan fungsi yang dibutuhkan Organisasi. Sekretaris BPBD telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta rata-rata telah tercapai sebesar 92,86% sedangkan capaian realisasi anggaran untuk itu hanya terealisasi sebesar 90,27% sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 9,73%.

Efiseinsi Kinerja yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian indikator sasaran dan realisasi keuangan penunjang sasaran maka diperoleh hasil efisiensi kinerja pada sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi sebesar 2,58%.

Adapun kendala yang dialami BPBD Kab. Tanah Laut dalam mencapai indikator Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi organisasi adalah struktur organisasi tata kelola BPBD Kab. Tanah Laut masih mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dimana Sekretaris BPBD Kab/Kota dengan typologi B adalah pejabat struktural eselon IV/a dan tidak memiliki Kepala Sub Bagian. Sehingga hal tersebut membuat beban kerja sekretaris BPBD Kab. Tanah Laut menjadi besar dengan beban tugas perencanaan, keuangan, pelaporan, umum, kepegawaian, kearsipan dan pengadaan barang dan jasa tanpa ada pejabat struktural yang membantu. Sedangkan beban kerja BPBD kab/kota sudah setara dengan SKPD yang lain.

- 2) Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

Sasaran strategis Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana dengan 13 indikator kinerja utama sebagaimana berikut :

Tabel 3.10. Realisasi IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan	1	Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	160 orang	226 orang	141,25
		2	Jumlah Tenaga TRC /Pusdalops yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	25 orang	5 orang	20 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Persentase Capaian
	peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.	3	Jumlah daerah Rawan Bencana	11 kec	11 Kec	100%
		4	Jumlah Laporan Kegiatan forum PRB	1 Laporan	1 Laporan	100%
		5	Jumlah Dokumen Bencana yang Tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
		6	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang di bina	2 Desa	2 Desa	100%
		7	Jumlah jenis Bencana yang di layani	7 Jenis	4 Jenis	85%
		8	Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana	350 paket	63 Paket	46%
		9	Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	30 buah	136 buah	273%
		10	Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan	12 laporan	100%
		11	Jumlah koordinasi pasca bencana	3 kali	3 kali	100%
		12	Jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana	11 Kec	11 Kec	100%
		13	Jumlah Desa/Kec yang Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	4 Desa / Kec	4 Desa / Kec	100%
Rata-Rata						105,01

Sedangkan perbandingan Capaian indikator kinerja utama pada tahun 2023 dengan capaian indikator kinerja utama pada tahun 2022 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi IKU Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian	
	2022	2023
Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi	0	235 orang
Jumlah Tenaga TRC / Pusdalops yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	26 orang	5 orang
Jumlah Daerah rawan bencana	11 Kec	11 Kec
Jumlah laporan kegiatan forum PRB	1 Laporan	1 Laporan
Jumlah Dokumen Bencana yang tersedia	1 Dokumen	1 Dokumen
Jumlah Desa Tangguh Bencana yang di bina	0	2 Desa
Jumlah jenis Bencana yang di layani	6 Jenis	4 Jenis
Jumlah logistik yang diterima oleh korban yang terdampak bencana.	86 Paket	63 Paket
Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi	136 buah	136 Buah
Jumlah laporan kejadian bencana	12 laporan	12 Laporan
Jumlah koordinasi pasca bencana	0	3 kali
Jumlah Lokasi yang terdampak pasca bencana	11 Kec	11 Kec
Jumlah Desa/Kec yang Rehabilitasi melalui pelatihan, pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya pasca bencana.	0	4 Desa / Kec

Pada Tahun 2023 dalam mencapai target indikator Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana BPBD Kab. Tanah Laut telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan indikator kinerja utama antaralain :

- Pelaksanaan Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi mitigasi bencana kepada warga/masyarakat/kelompok masyarakat yang berada di daerah rawan bencana sebanyak 235 orang dari target 160 orang. Adapun mitigasi bencana yang disosialisasikan adalah bencana banjir dan bencana kekeringan serta kebakaran hutan yang mana jenis bencana tersebut lah yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Laut. Sumber dana kegiatan sosialisasi KIE tidak hanya berasal dari APBD akan tetapi juga dibantu melalui APBDesa yang berada di wilayah rawan bencana.

- BPBD Kab. Tanah Laut melalui Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan tidak dapat melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas tenaga TRC/Pusdalops pada tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh BPBD Kab. Tanah Laut sehingga untuk capaian kinerja tidak maksimal. Capaian indikator jumlah TRC/Pusdalops yang dilatih hanya sebanyak 5 orang dari target 26 orang. Adapun sumber dana untuk 5 orang anggota TRC/Pusdalops yang mengikuti pelatihan berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
- BPBD telah memiliki Kajian Resiko Bencana (KRB) Kabupaten Tanah Laut Tahun sejak tahun 2018 yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bersama BPBD Kab. Tanah Laut. KRB Kab. Tanah Laut nantinya akan dilakukan review pada tahun 2024.
- Berdasarkan Kajian Resiko Bencana (KRB) Kab. Tanah Laut jumlah daerah rawan bencana di Kabupaten Tanah Laut berjumlah 11 kecamatan. BPBD Kab. Tanah Laut melalui Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan monitoring secara periodik keseluruhan daerah rawan bencana.
- Pada tahun 2023 BPBD Kab. Tanah Laut melaksanakan rapat Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB) terkait penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran hutan yang terjadi pada pertengahan hingga akhir tahun 2023.
- BPBD Kab. Tanah Laut melalui Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan pembinaan kepada Desa yang telah dan akan ditetapkan sebagai desa tangguh bencana, hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Adapun desa yang dibina adalah Desa Ranggung Kecamatan Takisung dan Desa Sungai Rasau Kecamatan Bumi Makmur.
- Sesuai dengan Kajian Resiko Bencana Kab. Tanah Laut bahwa potensi bahaya bencana di kabupaten tanah laut terdapat 7 jenis bencana yaitu, banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan serta tanah longsor. Jumlah jenis bencana yang di layani

tahun 2023 hanya sebanyak 4 jenis yaitu banjir, cuaca ekstrim, kebakaran hutan dan lahan dan kekeringan. Pada tahun 2023 tidak terjadi kejadian bencana tanah longsor. Kejadian banjir pada tahun 2023 di Kabupaten Tanah Laut sebanyak 13 kali kejadian di 3 Kecamatan dengan total korban yang terdampak sebanyak 6.893 jiwa. Kebakaran hutan dan lahan terjadi sebanyak 288 kejadian dengan lahan yang terbakar seluas 605,42 Ha. Kejadian bencana cuaca ekstrim terjadi sebanyak 9 kali sepanjang tahun 2023 dan untuk bencana kekeringan terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dan berdampak keseluruhan masyarakat. adapun langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam menanggulangi tersebut dengan mendistribusikan air bersih oleh seluruh SKPD dan BUMD serta sektor swasta kepada masyarakat Kabupaten tanah Laut. Tidak kurang dari 2 (dua) juta liter air yang dibagikan kepada masyarakat kabupaten tanah laut.

- Jumlah logistik yang diterima korban terdampak bencana untuk bantuan korban bencana pada tahun 2023 berjumlah 63 paket yang didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak bencana berupa paket sembako dari pengadaan APBD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan DPA BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2023 hanya tersedia untuk 30 paket. Bantuan logistik juga bersumber dari anggaran BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan Bantuan dari BNPB. Masyarakat yang menerima bantuan logistik adalah warga yang terdampak bencana Putting beliung, kebakaran pemukiman, banjir. Adapun bantuan logistik yang diberikan berupa Minyak goreng, mie instan, sarden, susu, gula, teh, kecap, kopi, telur, air mineral, beras, terpal.
- Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terpenuhi pada Tahun 2022 sebanyak 136 buah yang dibeli baik melalui Dana APBD Kabupaten Tanah Laut.
- Jumlah laporan kejadian bencana pada tahun Tahun 2023 adalah 12 laporan atau setiap bulan data kejadian bencana berjumlah 1 laporan yang langsung dibuat oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan bencana (Pusdalops) PB BPBD Kabupaten Tanah Laut dan di laporkan ke BPBD Provinsi Kalimantan Selatan seterusnya di lanjutkan ke BNPB Republik Indonesia.

- Kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam mencapai ketiga indikator tersebut dengan menyusun Kajian Kebutuhan Pasca Bencana sesuai dengan amanat Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana. Dalam penyusunan Jitupasna dilakukan dengan tahapan monitoring dan peninjauan lokasi bencana, kemudian melakukan pendataan terhadap korban bencana sampai dengan pendataan terhadap kerugian dampak bencana. Setelah data dikumpulkan maka dilakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam melakukan pemulihan baik fisik dan psikis manusia serta infrastruktur fasilitas umum.
- Pada kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap korban bencana di beberapa lokasi/wilayah terdampak bencana seperti dikecamatan kurau, bumi makmur, bati-bati dan takisung. Pada 4 kecamatan tersebut sudah berjalan sesuai dengan perencanaan perencanaan sebagai yang telah dikordinasikan dengan BNPB, BPBD Prov, maupun SKPD teknis lainnya. Adapun pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan adalah Pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat bencana bekerjasama dengan BNPB melalui dana siap pakai. BPBD Kab. Tanah Laut secara langsung turun kelapangan menemui para penyintas dan memberikan motivasi dan bimbingan konseling guna pemulihan psikologis masyarakat yang terdampak bencana.

Analisis efisiensi penggunaan anggaran sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam mencapai indikator kinerja utamanya didukung oleh anggaran BPBD Kab. Tanah Laut yang terdapat pada Program penanggulangan bencana yang terdiri dari 4 Kegiatan dan 7 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 630.685.413 dan realisasi sebesar Rp. 500.388.000 atau sebesar 79,34% dengan rincian sebagai berikut antara lain:

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sub kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) dengan anggaran sebesar Rp. 25.298.720 terealisasi sebesar Rp. 19.170.400 atau 75,78%.

- b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 328.401.091 terealisasi sebesar Rp. 260.709.400 atau 79,39% dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 28.401.091 terealisasi sebesar Rp. 19.814.400 atau 69,77%
 - 2) Penyusunan Rencana Kontijensi dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 terealisasi sebesar Rp. 240.895.000 atau 80,30%
- c) Kegiatan Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi korban Bencana dengan anggaran sebesar Rp. 192.132.181 terealisasi sebesar Rp. 164.153.200 atau 85,44% dengan sub kegiatan :
 - 1) Respon Cepat Darurat Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 85.967.710 terealisasi sebesar Rp. 74.640.000 atau 86,82%.
 - 2) Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban Bencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 29.244.471 terealisasi sebesar Rp. 22.508.200 atau 76,97%
 - 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 76.920.000 terealisasi sebesar Rp. 67.005.000 atau 87,11%
- d) kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana sub kegiatan penanganan pascabencana kabupaten/kota dengan anggaran sebesar Rp. 84.853.421 dan terealisasi sebesar Rp. 56.355.000 atau sebesar 66,41%.

Efisiensi Kinerja yang dihitung berdasarkan rata-rata capaian indikator sasaran dan realisasi keuangan penunjang sasaran maka diperoleh hasil efisiensi kinerja pada sasaran Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana sebesar 25,67%.

Beberapa hal yang menjadi hambatan BPBD Kab. Tanah Laut dalam pencapaian target indikator Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat

dalam penanggulangan bencana, berupa penyediaan peralatan, logistik dan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana antara lain :

- a) kurangnya anggaran yang diberikan untuk menunjang pencapaian target kinerja, sehingga BPBD kab. Tanah Laut tidak bisa melaksanakan kegiatan yang bersentuhan dengan masyarakat.
- b) Kurangnya personil yang ada di BPBD Kab. Tanah Laut.
- c) Penentuan indikator kinerja utama yang sulit di capai dikarenakan capaiannya sangat tergantung dengan kejadian bencana yang sangat tidak bisa di prediksi.
- d) Kurangnya anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) yang memenuhi syarat dalam melakukan kaji cepat sehingga tidak dapat menganalisis kebutuhan peralatan dan logistik yang harus dibawa pada saat penanganan bencana.

Dalam rangka perbaikan dan tindak lanjut atas hambatan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja maka pada tahun berikutnya akan diadakan perbaikan indikator kinerja utama. Selain penentuan indikator, penentuan targetnya pun juga sangat sulit dikarenakan hal yang sama. Kedepannya akan dilaksanakan pelatihan anggota TRC sesuai dengan yang telah di rencanakan pada tahun 2024 sehingga anggota TRC BPBD Kab. Tanah Laut lebih tanggap dalam menanggulangi bencana.

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 memperoleh anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sebesar Rp. 4.922.672.948,00 kemudian setelah dilakukan perubahan anggaran dan dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2023 sebesar Rp. 5.091.724.452 dan terealisasi sebesar Rp. 4.527.249.615,00 atau 88,91% yang terdiri dari :

- **Belanja Operasi**

Belanja operasi untuk tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 4.957.137.884,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.550.596.421,00, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.406.541.463,00.

Jumlah realisasi Belanja Pegawai selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp. 2.209.735.809,00 dan Rp. 2.074.698.592,00. Realisasi Belanja Pegawai Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 135.037.217,00 atau sebesar 7% dari tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.12 Realisasi Belanja Pegawai 2023

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.278.857.550	1.157.562.181	90,52	1.034.651.311	12
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.271.738.871	1.052.173.628	82,74	1.040.047.281	1
	Jumlah	2.550.596.421	2.209.735.809	86,64	2.074.698.592,00	7

Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa selama Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp. 2.197.613.806,00 dan Rp. 1.626.487.614,00. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 571.126.192,00 atau sebesar 35% dari tahun sebelumnya. Adapun rincian realisasinya sebagai berikut:

Tabel 3.13. Realisasi Belanja Barang dan Jasa 2023

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Barang Pakai Habis	166.326.056	143.336.036	86,18	56.587.958	153
2	Belanja Jasa Kantor	1.226.259.539	1.126.450.342	91,86	1.084.688.917	4
3	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	64.841.868	56.045.111	86,43	48.758.538	15
4	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	401.815.000	400.511.957	99,68	257.597.051	55
5	Belanja Perjalanan Dinas	302.745.000	238.960.360	78,93	178.855.150	34

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
6	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	244.554.000	232.310.000	94,99	0,00	0
	Jumlah	2.406.541.463	2.197.613.806	91,32	1.626.487.614	35

Berdasarkan uraian diatas realisasi Belanja Operasi pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.407.349.615,00 atau sebesar 88,91% dari total angara sebesar Rp. 4.957.137.884,00. Realisasi Belanja Operasi BPBD Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp. 706.163.409,00 atau sebesar 19 % dari tahun sebelumnya.

- **Belanja Modal**

Belanja Modal untuk tahun 2023 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 134.586.568,00. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 masing-masing sebesar Rp. 119.900.000,00 dan Rp. 315.950.325,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kabupaten Tanah Laut pada Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 196.050.325,00 atau sebesar 62% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
1	Belanja Modal Alat Bantu	49.950.000	45.000.000	90,09	65.225.125	(31)
2	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	23.681.340	20.400.000	86,14	13.680.000	49
3	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	19.980.000	18.000.000	90,09	29.400.000	(39)

No.	Uraian	TA. 2023			TA. 2022	Kenaikan/ (Penurunan) %
		Anggaran	Realisasi		Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	
4	Belanja Modal Komputer	40.975.228	36.500.000	89,08	12.680.000	188
5	Belanja Modal Alat Angkutan	0	0,00	0,00	40.100.000	(100)
6	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	0,00	0,00	1.357.000	(100)
7	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	0	0,00	0,00	153.508.200	(100)
	Jumlah	134.586.568	119.900.000	89,09	315.950.325	(62)

2. Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan DPA-SKPD tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp. 4.922.672.948,00 Dari anggaran tersebut telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) program yang terdiri atas 6 (Enam) kegiatan dan 16 (enam belas) sub kegiatan. Dari semua Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah terealisasi dengan baik, Realisasi menurut sasaran dan Program tahun 2023 adalah sebagai berikut :

3.15. Realisasi Menurut Program/Kegiatan/Subkegiatan

Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.091.724.452	4.527.249.615	88,91%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.461.039.039	4.026.861.615	90,27%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.550.003	4.465.270	98,14%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.671.970	3.636.070	99,02%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	878.033	829.200	94,44%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.552.746.698	2.211.348.209	86,63%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.550.596.421	2.209.735.809	86,64%

Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.150.277	1.612.400	74,99%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	260.889.121	246.228.726	94,38%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.956.153	1.538.220	78,63%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.412.761	53.493.840	87,11%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.136.255	1.581.306	74,02%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.528.952	9.760.000	92,70%
Penyediaan Bahan/Material	10.000.000	10.000.000	100,00%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	174.855.000	169.855.360	97,14%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.490.810	87.155.000	87,60%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.490.810	87.155.000	87,60%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.101.547.407	1.037.152.453	94,15%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.105.539	42.707.342	58,42%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.028.441.868	994.445.111	96,69%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	441.815.000	440.511.957	99,71%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	36.865.300	99,64%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	288.500.000	288.414.502	99,97%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.315.000	115.232.155	99,07%

Organisasi/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
		(Rp)	%
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	630.685.413	500.388.000	79,34%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	25.298.720	19.170.400	75,78%
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	25.298.720	19.170.400	75,78%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	328.401.091	260.709.400	79,39%
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	28.401.091	19.814.400	69,77%
Penyusunan Rencana Kontijensi	300.000.000	240.895.000	80,30%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	192.132.181	164.153.200	85,44%
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	85.967.710	74.640.000	86,82%
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	76.920.000	67.005.000	87,11%
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	29.244.471	22.508.200	76,97%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	84.853.421	56.355.000	66,41%
Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	84.853.421	56.355.000	66,41%
Jumlah	5.091.724.452	4.527.249.615	88,91%

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun 2023. Sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik beserta target-targetnya adalah informasi yang diharapkan dapat diberikan melalui Laporan Kinerja (LKj) ini.

Pencapaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan sesuai Rencana Strategis BPBD Kab. Tanah Laut Tahun 2018-2023 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2023 IKM BPBD Kab. Tanah Laut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, bila dibanding dengan tahun 2022 dengan jumlah pencapaian sasaran tahun 2023 adanya capaian nilai rata –rata semua unsur pelayanan Indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang dilaksanakan unit pelayanan BPBD dengan mengedarkan 150 (seratus lima puluh) kuesioner kepada masyarakat yang terdampak bencana tiap yang didalamnya terdapat 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor IKM 87,93 dengan kategori BAIK. Dengan nilai B (memuaskan) menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada umumnya sudah baik dan merasa sangat puas dengan pelayanan penanggulangan bencana bagi masyarakat yang terkena dampak langsung bencana baik karena faktor alam, bencana non alam dan bencana sosial.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dibuat dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sampai tahun 2023 masih banyak kendala-kendala yang harus dicarikan solusinya untuk peningkatan kinerja Permasalahan yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2023, adalah :

- a) Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum dapat dilaksanakan karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana tersebut.

- b) Pada saat musim kemarau Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sulit untuk dipadamkan apabila kebakaran hutan tersebut tidak bisa dijangkau oleh armada BPBD.
- c) Klasifikasi BPBD yang masih Type B mengakibatkan kesulitan untuk melaksanakan Tugas dan Fungsi BPBD sebagai Komando, Koordinator dan Pelaksana lapangan pada saat tanggap darurat bencana karena stakeholder yang di komando dan di koordinasikan yaitu setingkat Eselon II.
- d) Kelengkapan dan alat-alat pengaman personil yang belum memadai dan belum berstandar nasional.

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2023, semoga memberikan informasi yang berarti bagi yang memerlukan serta menjadi tolok ukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Pelaihari, Januari 2024

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Tanah Laut



Ir. SAHRUDIN

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19661210 199403 1 001